



RENCANA KERJA TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kerja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Benteng, 5 Mei 2025

KEPALA DINAS,

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP4KB) in Benteng. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. ANDI MASSAILE

NIP. 19650806 199402 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra DP3AP2KB	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB	36
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	38
BAB V PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu

RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renstra DP3AP2KB memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP3AP2KB, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 - 2045.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
13. Instruksi Bupati Nomor 059/17.a/Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang Inklusif;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 dan berpedoman pada Renstra DP3AP2KB.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menetapkan program dan kegiatan DP3AP2KB Tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DP3AP2KB;
4. Memberikan acuan dalam penngendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan DP3AP2KB.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah DP3AP2KB Tahun 2026 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra DP3AP2KB

Renja DP3AP2KB merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DP3AP2KB. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja DP3AP2KB Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu

dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja DP3AP2KB dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T- C. 29 (Terlampir).

Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 yang didukung dengan dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui dua urusan yaitu :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 12.484.346.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.505.670.274,- atau 76,12% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.288.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.110.041.475,- atau 94,56%.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 9.197.486.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.395.628.799,- atau 69,53%.

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 470.300.900,- dan

teralisasi sebesar Rp. 446.390.000,- atau 94,91% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 470.300.900,- dan teralisasi sebesar Rp. 446.390.000,- atau 94,91%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 4.621.545.100,- dan teralisasi sebesar Rp. 4.360.744.556,- atau 95,20% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Akurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.318.300,- dan teralisasi sebesar Rp. 21.185.900,- atau 74,72% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat daerah yang disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.789.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.739.200,- atau 69,43% dari alokasi anggaran;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.525.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.237.900,- atau 81,15%;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.700.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.482.500,- atau 99,11%;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.612.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.431.700,- atau 100%;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.172.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.055.400,- atau 72,71%.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.527.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.220.200,- atau 87,85%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan alokasi

anggaran Rp. 3.304.660.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.125.587.175,- atau 94,92% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 3.271.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.125.587.175,- atau 94,59% dari alokasi anggaran;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output sub kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 30.720.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.892.100,- atau 94,05% dari alokasi anggaran;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran Rp. 1.529.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.414.600,- atau 86,81% dari alokasi anggaran;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan output sub kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dengan alokasi anggaran Rp. 1.209.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 999.000,- atau 82,59% dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 10.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.380.000,- atau

95,75% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 10.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.380.000,- atau 95,89% dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.419.000,- atau 95,75% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan output sub kegiatan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.419.000,- atau 89,46% dari alokasi anggaran;
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi umum dengan alokasi anggaran Rp. 371.462.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 355.114.560,- atau 98,29% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 1.857.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.857.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output sub kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 17.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.318.000,- atau 84,22% dari alokasi anggaran;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output sub kegiatan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran Rp. 6.818.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.778.000,- atau 99,41% dari alokasi anggaran;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output sub kegiatan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 5.941.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.863.700,- atau 65,03% dari alokasi anggaran;
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 2.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.175.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan output sub kegiatan Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran Rp. 3.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.450.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;

- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara, dengan alokasi anggaran Rp. 334.220.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 332.672.860,- atau 99,54% dari alokasi anggaran.
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan alokasi anggaran Rp.340.000.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.350.000,- atau 89,27% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 340.000.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.350.000,- atau 89,27% dari alokasi anggaran;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 306.959.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 296.007.121,- atau 96,43% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 1.529.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.087.000,- atau 71,08% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan Jumlah layanan telepon, listrik

dan air yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 95.097.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.598.121,- atau 91,06% dari alokasi anggaran;

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan Jumlah layanan umum kantor yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 210.332.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.322.000,- atau 99,04% dari alokasi anggaran;

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp. 244.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 207.719.800,- atau 85,02%. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 36.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.394.000,- atau 95,20% dari alokasi anggaran;

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output sub kegiatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 145.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.247.800,- atau 76,26% dari alokasi anggaran;

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 11.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.831.000,- atau 98,46% dari alokasi anggaran;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 51.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.247.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan Alokasi Anggaran Rp. 98.110.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.913.400,- atau 92,66% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.027.400,- atau 80,11% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan

Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Advokasi Kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan output sub kegiatan Pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.027.400,- atau 80,11% dari alokasi anggaran.
- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 73.110.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.886.000,- atau 96,96% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 73.110.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.886.000,- atau 96,96% dari alokasi anggaran.

3) Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai

kesetaraan gender dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.339.300,- atau 84,46% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Kegiatan Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.339.300,- atau 84,46% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan output sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.339.300,- atau 84,46% dari alokasi anggaran.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan alokasi anggaran RP. 22.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.400,- atau 89,24% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas

Keluarga, dengan alokasi anggaran Rp. 22.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.400,- atau 89,24% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Tersedianya Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 22.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.400,- atau 89,24% dari alokasi anggaran;

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak secara up to date dan akurat dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.364.300,- atau 81,21% dari alokasi anggaran. adapun rincian kegiatan dari program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut:

- a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output Kegiatan Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.364.300,- atau 81,21% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian

Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah data gender dan anak yang disajikan dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.364.300,- atau 81,21% dari alokasi anggaran.

6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 78.681.400.- dan terealisasi sebesar Rp. 56.220.700,- atau 71,45%. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Output Persentase PHA yang terakomodir pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 33.681.400.- dan terealisasi sebesar Rp. 32.036.000,- atau 95,11% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 33.681.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.036.000,- atau 95,11% dari alokasi anggaran.

b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 45.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 24.184.700,- atau 53,74% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 45.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 24.184.700,- atau 53,74% dari alokasi anggaran.

7) Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 145.000.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.170.400,- atau 87,61% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Layanan Penyedia Perlindungan Khusus bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.033.000,- atau 92,13% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.033.000,- atau 92,13% dari alokasi anggaran.

8) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya dengan alokasi anggaran Rp. 113.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.540.600,- atau 84,55% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pengendalian Penduduk sebagai berikut:

a) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan dengan alokasi anggaran Rp. 113.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.540.600,- atau 84,55% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan output sub kegiatan Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.075.400,- atau 83,75% dari alokasi anggaran.
- 2) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan output sub kegiatan Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.047.000,- atau 94,42% dari alokasi anggaran.
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK dengan output sub kegiatan Pelaporan Program KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.418.200,- atau 79,03% dari alokasi anggaran.

9) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp.6.782.855.100,- dan terealisasi sebesar

Rp. 4.257.745.218,- atau 62,77% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dengan alokasi anggaran Rp. 1.779.849.800,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.417.610.318,- atau 79,65% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian Program KKBPK dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelaurga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.953.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.052.700,- atau 75,52% dari alokasi anggaran;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan output sub kegiatan Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaan Operasionalnya dengan lokasi anggaran Rp. 699.628.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 545.047.018,- atau 77,91% dari alokasi anggaran;
 - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan output

sub kegiatan Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.610.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran;

4) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan output sub kegiatan Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE Program KKBPK dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.602.000,- atau 98,60% dari alokasi anggaran;

5) Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan output sub kegiatan Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaan Operasionalnya dengan lokasi anggaran sebesar Rp. 701.267.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 524.298.600,- atau 74,76% dari alokasi anggaran.

b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan output Kegiatan Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan alokasi anggaran Rp. 693.261.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 685.240.000,- atau 98,84% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan alokasi anggaran Rp 118.461.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 112.840.000,- atau 95,25% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan output sub kegiatan Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan dengan alokasi anggaran Rp 574.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 572.400.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.
- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 1.739.936.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.556.859.900,- atau 89,48%. Kurangnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya perubahan nomengklatur sub kegiatan dengan mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan output sub kegiatan Jumlah Peserta KB yang menggunakan MKJP dengan alokasi anggaran Rp. 268.836.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.705.000,- atau 63,27% dari alokasi anggaran.

Rendahnya realisasi belanja pada sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan pada belanja jasa kantor yang kurang terealisasi karena sebagian besar pelayanan diklaim oleh BPJS.

- 2) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan output sub kegiatan jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.427.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.426.850.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- 3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran Rp. 13.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.742.000,- atau 93,69% dari alokasi anggaran;
- 4) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan output sub kegiatan Jumlah Pelayanan KB Bergerak dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.562.900,- atau 61,88% dari alokasi anggaran.
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB

dengan alokasi anggaran Rp. 2.569.808.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 598.035.000,- atau 23,27% dari alokasi anggaran. Kurangnya realisasi anggaran berasal dari Dana Isentif Fiskal dengan anggaran sebesar Rp. 1.439.058.500,- yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebagai berikut:

- 1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dengan output sub kegiatan Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 1.407.945.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.000.000,- atau 7,88% dari alokasi anggaran;
- 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan output sub kegiatan Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 1.161.863.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 487.035.000,- atau 41,92% dari alokasi anggaran. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh kurangnya Pejabat struktural di beberapa wilayah kecamatan, diantaranya kecamatan Bontosikuyu, kecamatan Bontoharu, kecamatan Pasilambena, kecamatan Takabonerate yang seyogianya dapat membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.

10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan alokasi anggaran Rp. 1.017.757.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 877.712.400,- atau 86,24% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output Kegiatan Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina dengan alokasi anggaran Rp. 1.017.757.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 877.712.400,- atau 96,64% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut:

- 1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan output Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan

alokasi anggaran sebesar RP. 56.257.200,- dan terealisasi sebesarRp. 54.709.900,- atau 97,25% dari alokasi anggaran;

- 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.750.000,- atau 77,58% dari alokasi anggaran;
- 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output kegiatan Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 661.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 590.252.500,- atau 89,23% dari alokasi anggaran.

D. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja

1. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Masih terbatasnya Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk belum optimalnya Operasionalisasi UPT PPA.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pernikahan anak, kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- c. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya berKB.
- d. Kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, yang seharusnya satu orang satu desa, sementara yang terjadi di Kabupaten Kepulauan selayar tidak ada Kecamatan yang cukup jumlah penyuluhnya.
- e. Adanya wilayah yang tidak mempunyai pejabat defenitif sebagai Kepala UPTD Wilayah Kecamatan.
- f. Kurangnya biaya operasional yang menunjang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal.

2. Solusi Yang dilakukan adalah :

- a. Penyediaan anggaran yang memadai untuk berbagai kegiatan dan program perlindungan perempuan dan anak termasuk pembiayaan yang selektif mungkin untuk mendukung opsionalisasi dan kinerja UPT PPA.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia terkhusus pada Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Ka. UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana di 4 wilayah yaitu Wilayah III Kecamatan Bontoharu Bontosikuyu, Wilayah IV Kecamatan Takabonerate, Wilayah V Kecamatan Pasimarannu dan Wilayah VI Kecamatan Pasilambena.
- c. Peningkatan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana.
- d. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan KB dengan memperluas jaringan layanan KB di daerah-daerah terpencil.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Pelayanan kinerja daerah disertai fakDP3AP2KB sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator DP3AP2KB beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel T-C.30 (Terlampir).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB.

Isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah masih rendahnya kualitas keluarga serta kesetaraan dan keadilan gender. Peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Keluarga yang memiliki kualitas yang baik, maka setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu pondasi dalam mewujudkan kualitas ketahanan keluarga adalah tercapainya kesetaraan gender. Terdapat tiga dimensi penyebab ketimpangan ini yaitu :

1. Dimensi Kesehatan

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada dimensi kesehatan yaitu peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif di seluruh wilayah terkhusus wilayah kepulauan, Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh penduduk miskin dan rentan lainnya, dan perbaikan gaya hidup dan pola konsumsi ibu dan bayi baru lahir.

2. Dimensi Pemberdayaan

Terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yang perlu menjadi perhatian yaitu kesetaraan akses masyarakat terhadap pendidikan, berkualitas dan terjangkau, termasuk pemenuhan hak pendidikan yang membutuhkan perlindungan khusus (penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawinan anak, anak di panti dan lainnya) hingga jenjang pendidikan tinggi. Selain itu ketersediaan SDM tenaga pendidik/kependidikan yang berkualitas di seluruh jenjang pendidikan, perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kesetaraan pada dimensi pemberdayaan.

3. Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Pada dimensi tenaga kerja perlu ditingkatkan akses terhadap lima modal penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan dan peluang kerja terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, dan penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi maupun dari OPD kabupaten sebagaimana disajikan dalam Tabel T-C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun kebijakan Nasional. Program prioritas pembangunan DP3AP2KB Tahun 2026 guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja DP3AP2KB

Tujuan Renja DP3AP2KB Tahun 2026 adalah implementasi Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar perempuan, anak dan penyandang masalah sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian Misi ke-1 dan Misi ke-6

Misi ke-1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif. Misi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui “Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah

Misi ke-6 : Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya dan Agama
Misi ke-6 ini dilaksanakan untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial melalui :

- a. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membangun keberdayaan, persatuan dan kesatuan masyarakat di dalam keragaman suku, agama dan budaya yang menjunjung tinggi sifat toleransi, serta membangkitkan sifat kegotong royongan;
- b. Program Pembinaan Keagamaan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan (Imtak) yang menjunjung tinggi etika dan budaya sesuai keyakinan yang dianut.

Sasaran Renja DP3AP2KB adalah terwujudnya keberdayaan dan pemenuhan hak dasar perempuan, anak dan penyandang masalah kekejaan sosial

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program dapat juga diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Jumlah program yang diusulkan Tahun Anggaran 2024 adalah 10 program dengan 23 kegiatan dan 57 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka rencana kerja kedepan berdasarkan urusan dan indikator kinerja kunci (IKK) yang tercantum pada RPJMD 2021-2026.

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, pemberantasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi daerah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan adalah :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan

BAB V

PENUTUP

Renja sebagai pedoman bagi pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. DP3AP2KB berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja DP3AP2KB serta diselaraskan dengan RKPD Tahun 2026;
 - b. DP3AP2KB berkewajiban menyusun RKA Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.
3. Rencana Tindak Lanjut

Renja selain sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DP3AP2KB. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam

memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tabel 27-C
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun giawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rentsra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB	Sasaran 1: - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	63,03	5,512,959,000	70,28	5,588,431,409	70,53	5,728,309,847	71,51	5,865,732,000	72,31	6,005,688,366	72,31	6,005,688,366	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar
	Sasaran 3 : - Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan DP3AP2KB			Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35	83,00		85,00		88,00		91,00		95,00		95,00			
Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PersentaseTersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	60,000,000	100%	63,000,000	100%	84,000,000	100%	100,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	15,000,000	6 Dok	15,000,000	6 Dok	16,000,000	6 Dok	20,000,000	6Dok	20,000,000	30 Dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	6Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	7,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	25,000,000	6Dok	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Lap.	10,000,000	4 Lap.	10,000,000	4 Lap.	20,000,000	4 Lap.	20,000,000	4 Lap.	25,000,000	24 Dok	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Meningkatnya ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	1	100	4,007,437,081	100	4,012,437,081	100	4,034,437,081	100	4,049,437,081	100	4,049,437,081	100	4,049,437,081	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 org	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	41 org	3,919,437,081	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitirasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 org	19 org	20,000,000	19 org	20,000,000	19 org	25,000,000	19 org	25,000,000	19 org	25,000,000	19 org	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	22,000,000	1 Dok	27,000,000	1 Dok	30,000,000	1 Dok	35,000,000	1 Dok	35,000,000	6Dok	35,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	16,000,000	1 Lap.	16,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	25,000,000	6 Lap.	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	6 Lap.	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1 dok	1 dok	15,000,000		15,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Meningkatkan penyusunan administrasi barang milik daerah pada perangkat	Meningkatnya ketersediaan pemenuhan barang milik daerah pada perangkat daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	-	-
Meningkatkan penyusunan administrasi kepegawaian daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	100%	127,000,000	100%	172,000,000	100%	252,500,000	100%	317,500,000	100%	317,500,000	100%	317,500,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 unit	30,000,000	1 unit	35,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	41 Paket	82,000,000	41 Paket	82,000,000	41 Paket	102,500,000	41 Paket	102,500,000	41 Paket	102,500,000	41 Paket	102,500,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	6 Dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	0	1 Dok	10,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	5 Dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0	1 Dok	10,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 org	-	0	21 org	20,000,000	21 org	25,000,000	21 org	50,000,000	21 org	50,000,000	21 org	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	JumlahOrang yang Mengikuti Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan	-	-	0	15 org	0	-	20,000,000	15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0		0	-		15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	15 org	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan penyusunan administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum	100%	100%	287,400,000	100%	307,500,000	100%	318,500,000	100%	359,500,000	100%	368,500,000	100%	368,500,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 Paket	5,000,000	4 Paket	25,000,000	4 Paket	25,000,000	4 Paket	30,000,000	5 Paket	30,000,000	5 Paket	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10 Paket	60,000,000	10 Paket	60,000,000	10 Paket	65,000,000	10 Paket	70,000,000	10 Paket	70,000,000	10 Paket	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	15,000,000	10 Paket	15,000,000	10 Paket	16,000,000	10 Paket	16,000,000	10 Paket	20,000,000	10 Paket	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30,000,000	3 Paket	30,000,000	3 Paket	35,000,000	3 Paket	40,000,000	3 Paket	40,000,000	3 Paket	40,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dok.	2 Dok.	2,400,000	2 Dok.	2,500,000	2 Dok.	2,500,000	2 Dok.	2,500,000	2 Dok.	3,500,000	2 Dok.	3,500,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

[illegible]

			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	1 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	55,000,000	2 unit	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100%	587,371,919	100%	589,744,328	100%	595,122,766	100%	595,544,919	100%	611,501,285	100%	611,501,285	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap.	3 Lap.	90,331,919	3 Lap.	92,704,328	3 Lap.	93,082,766	3 Lap.	93,504,919	3 Lap.	94,461,285	3 Lap.	94,461,285	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap.	3 Lap.	15,000,000	3 Lap.	15,000,000	3 Lap.	20,000,000	3 Lap.	20,000,000	3 Lap.	35,000,000	3 Lap.	35,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Lap.	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	5 Lap.	482,040,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemenuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	308,750,000	100%	308,750,000	100%	308,750,000	100%	308,750,000	100%	348,750,000	100%	348,750,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar

[illegible]

Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga yang berbasis sistem data gender dan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan berkeadilan gender (KKG) di berbagai sektor pembangunan	meningkatnya kualitas perempuan dan perlindungan anak		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
						317,760,000		322,110,134			330,172,551		338,093,389		347,160,298		347,160,298	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.	
Meningkatkan keberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan	Meningkatnya kualitas keluarga,keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	0,12%	0,25	135,000,000	25%	136,848,150	26%	140,273,459	27%	143,638,619	28%	147,065,837	28%	147,065,837	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.	
Meningkatkan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten	13,64%	13,61%	65,000,000	13,72%	66,848,150	13,83	70,273,459	13,94	73,638,619	14,05	77,065,837	14,05	77,065,837	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	3 Dok.	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	18,000,000	5 Dok.	18,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dok.	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	18,000,000	5 Dok.	20,000,000	5 Dok.	20,000,000	5 Dok.	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.	
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 OPD	24 OPD	15,000,000	24 OPD	16,848,150	24 OPD	17,273,459	24 OPD	17,638,619	24 OPD	18,065,837	24 OPD	18,065,837	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.	

			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 OPD	24 OPD	20,000,000	24 OPD	20,000,000	24 OPD	20,000,000	24 OPD	21,000,000	24 OPD	21,000,000	24 OPD	21,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan Keberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Proporsi yang Diduduki Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah	24%	24%	55,000,000	24%	55,000,000	24%	55,000,000	24%	55,000,000	28%	55,000,000	28%	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	30,000,000	1 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	2 Dok	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	28 organisasi	25,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten	86,36	86,36	15,000,000	86,36	15,000,000	87,00	15,000,000	87,00	15,000,000	87,00	15,000,000	87,00	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	28 Lembaga	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	28 Lembaga	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Perempuan		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	39/ 100.000 Penduduk Perempuan	33/ 100.000 Penduduk Perempuan	35,000,000	28/ 100.000 Penduduk Perempuan	35,479,150	23/ 100.000 Penduduk Perempuan	36,367,193	18/ 100.000 Penduduk Perempuan	37,239,642	12/ 100.000 Penduduk Perempuan	38,128,180	12/ 100.000 Penduduk Perempuan	38,128,180	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
Meningkatnya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	Meningkatkan Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Ditangani		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	4,5%	4,5%	0	5,5%	0	6,3%	0	6,9%	0	7,9%	0	7,9%	0	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar.
Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatkan Perempuan Korban Kekerasan yang Dirujuk		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang dirujuk	4,5%	4,5%	0	5,5%	0	6,3%	0	6,9%	17,239,642	7,9%	18,128,180	7,9%	18,128,180	DP3AP2KB	Kab.Kep . Selayar

			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 kali	-	0	-	0	-	0	4 kali	17,239,642	4 kali	18,128,180	4 kali	18,128,180	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan		Penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan	100	100	35,000,000	100	35,479,150	100	36,367,193	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana prasarana Layanan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lap.	1 lap.	15,000,000	1 lap.	15,479,150	1 lap.	16,367,193	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Penanganan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 org	10 org	20,000,000	10 org	20,000,000	10 org	20,000,000	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi darurat khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

[illegible]

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Meningkatkan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	0,18	0,18	20,000,000	0,36	20,273,800	0,54	20,781,253	0,72	21,279,795	0,88	21,787,531	0,88	21,787,531	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten	0,18	0,18	20,000,000	0,36	20,273,800	0,54	20,781,253	0,72	21,279,795	0,88	21,787,531	0,88	21,787,531	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,273,800	1 Dok	10,281,253	1 Dok	10,779,795	1 Dok	11,287,531	1 Dok	11,287,531	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,500,000	1 Dok	10,500,000	1 Dok	10,500,000	1 Dok	10,500,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar
TerpenuhiHanya Hak Anak	Terjalinnya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak		PPROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	50	50	32,760,000	52,50	33,208,484	55,00	34,039,693	57,50	34,856,305	60,00	35,687,976	60,00	35,687,976	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Meningkatnya PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	100%	100%	12,760,000	100%	13,208,484	100%	14,039,693	100%	0	100%	0	100%	0	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	10 Organisasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	12,760,000	1 Dok	13,208,484	1 Dok	14,039,693		0		0		0	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar
Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Meningkatnya Penguatan Lembaga Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1.01010101	11.111	20,000,000	88.89	20,000,000	88.89	20,000,000	88.889	34,856,305	100%	35,687,976	100%	35,687,976	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	9 anak	14,856,305	9 anak	15,687,976	9	15,687,976	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000		0		0		0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	10,000,000		0	-	0	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
Terpenuhinya Perlindungan Khusus Anak	Terjalinnya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam Perlindungan Khusus anak		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	100	100	60,000,000	100	60,821,400	100	62,343,760	100	63,839,386	100	66,362,594	100%	66,362,594	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Meningkatnya Peran Lingkup Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah kab/Kota	Persentase Peran Lingkup Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	75%	75%	10,000,000	80%	10,821,400	80%	11,343,760	90%	11,839,386	100%	13,362,594	100%	13,362,594	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangam Kabupaten/Kota	28 OPD	28 OPD	10,000,000	28 OPD	10,821,400	28 OPD	11,343,760	28 OPD	11,839,386	28 OPD	13,362,594	28 OPD	13,362,594	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Kewenangan Kabupaten/Kota	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Meningkatnya Peran Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100%		30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bag Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 anak	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	30 anak	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khususus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,000,000	1	23,000,000	1	23,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap.	1 Lap.	10,000,000		0	1 Lap.	11,000,000	1 Lap.	11,000,000	1 Lap.	12,000,000	1 Lap.	12,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

[illegible]

[illegible]

			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pelaksanaa Sarasehan hasil Pemuktahiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemuktahiran Data Keluarga	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Meningkatkan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Meningkatnya Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah yang Dipetakan		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan	-	75%	20,000,000	75%	20,273,800	80%	20,781,253	80%	21,279,795	100%	21,787,531	100%	21,787,531	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	-	-	0	-	0	-	0		0		0		0	-	-

			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	-	-	0		0		0		0		0	-	-		
			Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	-	0	-	0	-	0		0		0	-	-		
			Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	-	-	0	-	0		0		0		0	-	-		
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-		
			Pengembangan Model Solusi Startegis Pengendlaian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-		
			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan)		-	-	0	-	0		0	-	0	-	0	-	-		
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang	1 Kpg KB		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-		0	-	0		0	-	0	-	0	-	-		
			Pemanfaatan Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			0		0		0		0		0	-	-		
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		36514 KK (data)	5,000,000	36530 KK(dat a)	5,000,000	36545 KK (data)	5,000,000	536530 KK (data)	5,000,000	536550 KK(dta)	5,000,000	536550 KK (data)	5,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	36514 KK (Lap.)	5,000,000	36514 KK (lap.)	5,000,000	36514 KK (Lap.)	5,000,000	36514 KK (Lap.)	5,000,000	36514 KK (Lap.)	5,000,000	36514 KK (Lap.)	5,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15 Dok.	15 Dok.	10,000,000	15 Dok.	10,273,800	15 Dok.	10,781,253	15 Dok.	11,279,795	15 Dok.	11,787,531	15 Dok.	11,787,531	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pembinaan dan pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
Menurunnya LPP dan TFR, berkurangnya pernikahan usia dini dan meningkatnya CPR	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakencana		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	78,02	78,45	3,000,881,000	78,80	3,041,963,061	80,00	3,118,103,396	80,35	3,192,906,697	80,50	3,269,089,451	80,50	3,269,089,451	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pnegendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	4545	45,45	508,481,000	54,54	783,563,061	72,72	879,703,396	90,90	910,506,697	100	941,689,451	100	941,689,451	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Advokasi Program KKBPK kepada Stekeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelaurga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	17 organisasi	17 organisa si	35,000,000	17 organi sasi	35,000,000	17 organis asi	55,000,000	17 organis asi	55,000,000	17 organis asi	55,000,000	17 organis asi	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelaurga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	2 Dok.	30,000,000	2 Dok.	60,000,000	2 Dok.	65,000,000	2 Dok.	70,000,000	2 Dok.	80,000,000	2 Dok.	80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	2 unit	35,000,000	4 unit	60,000,000	6 unit	70,000,000	6 unit	85,000,000	6 unit	90,000,000	6 unit	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

#####

			Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dok.	2 Dok.	33,481,000	2 Dok.	48,563,061	2 Dok.	49,703,396	2 Dok.	55,506,697	2 Dok.	61,689,451	2 Dok.	61,689,451	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam PencitraanProgram KKBPK	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Digunakan dalam Pencitraan sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 media	2 media	45,000,000	2 media	70,000,000	2 media	80,000,000	2 media	80,000,000	2 media	80,000,000	2 media	80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	1 lap.	30,000,000	1 lap.	60,000,000	1 lap.	60,000,000	1 lap.	65,000,000	1 lap.	75,000,000	1 lap.	75,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	11 lap	11 lap	150,000,000	11 lap	200,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	11 lap	11 lap	150,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	11 lap	250,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya Kapasitas PKB/PLKB		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52.63	52.63	1,549,400,000	63.16	844,400,000	73.68	794,400,000	84.21	804,400,000	100	744,400,000	100.00	744,400,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	-	-	-	organisa	50,000,000	organisa	50,000,000	organis	50,000,000	organisa	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	20 unit motor	rehab 11 balai	935,000,000	3 LCD + 3 Laptop +3 Proyek tor	200,000,000	5 laptop + 5 printer	90,000,000	5 laptop + 5 printer	90,000,000	1 laptop + 1 printer	20,000,000	1 laptop + 1 printer	20,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	11 kali	11 kali	30,000,000	11 kali	60,000,000	11 kali	70,000,000	11 kali	80,000,000	11 kali	90,000,000	11 kali	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	474 kader	474 kader	584,400,000	74 kade	584,400,000	74 kade	584,400,000	74 kade	584,400,000	74 kade	584,400,000	74 kade	584,400,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Meningkatnya Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB		Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100	100	728,000,000	100	1,014,000,000	100	1,029,000,000	100	1,063,000,000	100	1,113,000,000	100	1,113,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.

			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Lap.	15 Lap.	50,000,000	15 Lap.	85,000,000	15 Lap.	85,000,000	15 Lap.	85,000,000	15 Lap.	90,000,000	15 Lap.	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	15 Orang	50,000,000	15 Orang	60,000,000	15 Orang	65,000,000	15 Orang	65,000,000	15 Orang	70,000,000	15 Orang	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3658 PUS	3658 PUS	198,000,000	3658 PUS	198,000,000	3658 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	3690 PUS	198,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		15 Dok'	50,000,000	15 Dok'	70,000,000	15 Dok'	70,000,000	15 Dok'	75,000,000	15 Dok'	80,000,000	15 Dok'	80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	1 Gudang Alokon	50,000,000	1 Gudang Alokon	60,000,000	1 Gudang Alokon	60,000,000	1 Gudang Alokon	70,000,000	1 Gudang Alokon	80,000,000	1 Gudang Alokon	80,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	10 org	12 org	40,000,000	12 org	55,000,000	15 org	60,000,000	15 org	70,000,000	15 org	70,000,000	15 org	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan	1 lap.	1 lap.	40,000,000	1 lap.	80,000,000	1 lap.	85,000,000	1 lap.	90,000,000	1 lap.	95,000,000	1 lap.	95,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas kesehatan dan kelompok Kegiatan	-	3.846 PUS	50,000,000	.846 PUS	70,000,000	.846 PUS	70,000,000	.846 PUS	70,000,000	.846 PUS	75,000,000	.846 PUS	75,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-	6 org	60,000,000	6 org	66,000,000	7 org	66,000,000	9 org	70,000,000	15 Bidan	75,000,000	15 Bidan	75,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Dukungan Opsional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11 lap	11 lap	80,000,000	11 lap	150,000,000	11 lap	150,000,000	11 lap	150,000,000	11 lap	160,000,000	11 lap	160,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		3.846 PUS	30,000,000	.846 PUS	70,000,000	.846 PUS	70,000,000	.846 PUS	70,000,000	.846 PUS	70,000,000	.846 PUS	70,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Peningkatan Kesertaan KB pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	-	2 org	30,000,000	2 org	50,000,000	2 org	50,000,000	2 org	50,000,000	2 org	50,000,000	2 org	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	50	55	215,000,000	65	400,000,000	70	415,000,000	80	415,000,000	90	470,000,000	90	470,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar.
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB		7 organisasi	50,000,000	organisasi	50,000,000	organisasi	50,000,000	organisasi	50,000,000	organisasi	60,000,000	organisasi	60,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	Jumlah DOKumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	11 Dok	11 Dok	35,000,000	11 Dok	70,000,000	11 Dok	75,000,000	11 Dok	75,000,000	11 Dok	90,000,000	11 Dok	90,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 kpg KB	27 kpg KB	50,000,000	7 kpg KB	80,000,000	7 kpg KB	90,000,000	7 kpg KB	90,000,000	7 kpg KB	120,000,000	7 kpg KB	120,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	27 Kampung KB	27 Kpg KB	80,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	27 Kpg KB	200,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
Meningkatkan Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Keluarga Sejahtera		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	998,800,000		1,012,473,572		1,037,815,786	BKB (73,86%),BKR (61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	1,062,712,986		1,088,069,318	BKB (73,86%),BKR (61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	1,088,069,318	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Peran Serta Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Keluarga		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang Dibina	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	798,000,000		811,673,572		837,015,786	BKB (73,86%),BKR (61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	861,912,986		882,269,318	BKB (73,86%),BKR (61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%)	882,269,318	DP3AP2KB	Kab.Kep .Selayar.
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang Dibentuk	80	80	65,000,000	80	65,000,000	80	65,000,000	82	65,000,000	82	65,000,000	82	65,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar.

			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 poktan	8 poktan	148,000,000	8 poktan	148,000,000	9 poktan	167,000,000	10 poktan	185,000,000	11 poktan	204,000,000	6 poktan	204,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 Lap.	60,000,000	6 Lap.	60,000,000	6 Lap.	65,000,000	6 Lap.	65,000,000	6 Lap.	65,000,000	6 Lap.	65,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 kader	50,000,000	6 kader	52,673,572	6 kader	54,015,786	6 kader	55,912,986	6 kader	57,269,318	6 kader	57,269,318	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 kader	50,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	6 kader	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	6 poktan	60,000,000	6 poktan	66,000,000	6 poktan	66,000,000	6 poktan	66,000,000	6 poktan	66,000,000	6 poktan	66,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PI K R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 lap.	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	55,000,000	11 lap.	55,000,000	11 lap.	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hrebat, generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11 lap.	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)	-	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	2 Dok.	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (indeks Pembangunan Keluarga)	-	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	6 dok	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang MendapatkanAdvokasi dan Promosi ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	6 org	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	22 org	60,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (indeks Pembangunan	-	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	11 lap.	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar

Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7 organisasi	7 organisasi	200,800,000	7 organisasi	200,800,000	7 organisasi	200,800,000	7 organisasi	200,800,000	7 organisasi	205,800,000	7 organisasi	205,800,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar.
			Penguatan kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	6 kebijakan	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	7 organisasi	50,800,000	DP3AP2KB	Kab.Kep.Selayar

			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	7 organisasi	50,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	7 lap.	50,000,000	7 lap.	50,000,000	7 lap.	50,000,000	7 lap.	50,000,000	7 lap.	55,000,000	7 lap.	55,000,000	DP3AP2KB	Kab.Kep. Selayar
							9,850,400,000		9,985,251,976		10,235,182,833		10,480,724,867		10,731,794,964		10,731,794,964		

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja DP3AP2KB yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	0,12	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	
2	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)								
	- BKB	0,7386	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
	- BKR	0,6136	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	
	BKL	0,6156	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
	PIK R	0,5119	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
	- UPPKS	0,909	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	78,02	78,45	78,80	80,00	80,35	80,50	80,50	

Tabel T-C 29
Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja DP3AP2KB dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja DP3AP2KB) tahun 2024(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja DP3A2KB tahun 2023 (n-2)	Realisai Renja DP3A2KB tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok.	7 dok.	6 dok.	6 dok.	100%	3 dok.	1600% 267%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.	300% 300%
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	2 dok.	400% 200%
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.	300% 300%

	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	12 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	12 dok.	0	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	4 paket	10 paket	10 paket	100%	5 paket	1900%	380%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	3 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	2300%	230%
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	4 paket	10 paket	10 paket	100%	5 paket	1900%	190%
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	5 paket	5 paket	100%	4 paket	1200%	400%
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	600%	300%
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3600%	300%
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 lap.	294 spd	214 lap	214 lap	100%	350 Laporan	85800%	1560%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	0	1 Paket	1 Paket	-	5 paket	600%	120%
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	0	5 unit	5 unit	-	12 unit	1700%	340%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	12 Laporan	2400%	200%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3600%	300%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 ;aporan	12 ;aporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3600%	300%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 kendaraan	93 kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan	100%	1 kendaraan	100%	100%

	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	93 kendaraan	93 kendaraan	82 kendaraan	82 kendaraan	100%	82 kendaraan	8200%	88%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	20 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	1000%	333%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									
	1	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Perangkat DAerah	28 Perangkat DAerah	29 Perangkat DAerah	29 Perangkat DAerah	100%	0	0%	0%
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	5 Dok	1 Dok.	120 org	120 org	100%	0	0%	0%
	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	29 OPD	-	-	-	-	6 OPD	0	0
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok.	1 Dok.	0	0	0	0	0	0
	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	28 Ormas	28 Ormas	28 Ormas	28 Ormas	100%	0	0%	0%

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 -	1 organisasi Dharma Wanita	1 organisasi Dharma Wanita	1 organisasi Dharma Wanita	100%	1 organisasi Dharma Wanita	100%	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Penanganan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	28 Perang kat Daerah	-	-	0	0	0	0
	3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	0	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	0	0%	#DIV/0!
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	2 Dok.	0	0
	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi Pemerintah dan Swasta	10 Organisasi Pemerintah dan Swasta	10 Organisasi Pemerintah dan Swasta	10 Organisasi Pemerintah dan Swasta	100%	0	0%	#DIV/0!
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%	0	0%	#DIV/0!
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	0	0	0	0	0	0	0
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok.	-	2 dok.	2 dok.	0%	5 dok.	0	0
	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dok.	1 dok.	0%	0	0%	0	0	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 OPD	0	0	0	0	0	0	0
	2	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	0	0	0	0	0	1 Keg.	0	0
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	0	0	0	0	0	0	0

		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota Terhadap Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	3 Dok	0	0	0	0	0	0	0
	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dok	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	11 Dok	0	0	0	0	0	0	0
	4	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	11 Dok	0	0	0	0	0	0	0
	5	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2 satuan pendidikan	2 SSK	0	0	0	0	0	0
	6	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
	1	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dok	0	0	0	0	0	0	0
	2	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	27 unit	0	0	0	0	0	0	0
	3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	11 Dok	0	0	0	0	0	0	0
	4	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Lap.	11 Lap.	0		0	11 Lap.	0	0

	5	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	11 dok.	15 dok.	15 dok.	15 dok.	100%	11 Lap.	1100%	100%
	6	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	11 Lap.	0	0	0	0	11 Lap.	0	0
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									
	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	12 organisasi	17 organisasi	1 kali	1 kali	100%	0	0%	#DIV/0!
	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 dok.	0	1 dok.	1 dok.	0	0	0	0
	3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 dok.	2 dok.	3 dok.	3 dok.	100%	0	0%	#DIV/0!
	4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
	4	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	11 Lap.	11 Lap.	11 Lap.	11 Lap.	100%	11 Lap.	1100%	100%
	5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Lap.	11 Lap.	11 Lap.	11 Lap.	100%	11 Lap.	1100%	100%

	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 Lap.	15 Lap.	15 Lap.	15 Lap.	100%	0	0%	0
	2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4224 org	0	0	0	0	4224 org	0	0
	3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Pelayanan KB	11 unit	11 unit	0	0	0		0	0
	4	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50 org	15 org	17 faskes	17 faskes	100%	17 Faskes	1700%	100%
	5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 Lap.	0	17 Lap.	17 Lap.	0	17 Lap.	0	0
	6	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11 Lap.	0	15 Lap.	15 Lap.	100%	11 Lap.	1100%	100%
	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan	0	0	11 Lap.	11 Lap.	0	0	0	0
	9	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	20 org		0	0	0	0	0	0
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
	1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	0	0

	2	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 organisasi	27 Kampung KB	0	0	0%	0	0	0
	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 Kampung KB	27 Kampung KB	27 Kampung KB	27 Kampung KB	100%	27 Kampung KB	2700%	100%
	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan terpadu Kampung KB	1 Lap.	11 Dok	1 Lap.	1 Lap.	100%	0	0%	#DIV/0!
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			0						
	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	5 Klp	3 unit	0	0	0	0	0	0
	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 unit	0	4 unit	4 unit	100%	20 unit	2000%	100%
	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Lap	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25%	25%	26%	27%	0,543%	25%	26%	
2			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	33/100.000 Penduduk Perempuan	0,055	0,063	18/100.000 Penduduk Perempuan	9,56	0,055	0,055	
3			Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	3	6	8	9	0	6	8	
4			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100	
5			Cakupan Layanan Sistem Data Gender dan Anak	18	36	54	72	18	36	54	
6			TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08%	2,07%	2,06%	2,05%	2,00%	2,07%	2,06%	
7			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/mCPR)	78,45%	78,8%	80%	80,35%	75,54%	78,8%	80%	
8			Cakupam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)								
			BKB	73,86	74,23	74,60	73,86	14,38	74,23	25,13	
			BKR	61,36	61,67	61,98	61,36	5,74	61,67	10,22	
			BKL	61,56	61,87	62,18	61,56	6,00	61,87	10,26	
			PIK R	51,19	51,45	51,70	51,19	4,30	51,45	100	
			UPPKS	90,9	91,35	91,81	90,9	5,09	91,35	90,81	

[illegible]

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA					7.930.377.000,00							8.299.100.000,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.850.377.000,00								8.143.100.000,00			
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.787.877.000,00								5.323.100.000,00			
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.502.000.000,00						-	4.888.100.000,00			
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00				-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	48.600.000,00		
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	25.000.000,00		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.500.000,00		DP3AP2KB
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		3.300.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.300.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.250.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.250.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	3.577.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	3.809.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	3.487.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.700.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		87.500.000,00	DP3AP2KB

	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.500.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.000.000,00	DP3AP2KB

[illegible]

						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				30 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	208.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	260.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		10.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				355 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		250.000.000,00	DP3AP2KB

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				0 orang	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.000.000,00	DP3AP2KB
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	85.000.000,00					-	110.000.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00		-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	25.000.000,00	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				2 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	DP3AP2KB

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					10 Orang	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.000.000,00	DP3AP2KB	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.062.500.000,00								2.820.000.000,00	
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	681.646.000,00						-		745.000.000,00		
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	681.646.000,00				-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-	-	745.000.000,00		
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				11 Laporan	621.646.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-		675.000.000,00	DP3AP2KB		
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				11 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-		120.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-		-	142.500.000,00			-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-	-	145.000.000,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				479 Orang	142.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-		145.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	186.000.000,00			-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-	-	395.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					17 Laporan	28.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-		35.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak															
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					11 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-		25.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-				-	470.000.000,00			-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-	-	485.000.000,00	
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas															
							Jumlah DASHAT di Kampung KB					88 Unit	270.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-		275.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas															

[illegible]

						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				0 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa	-		0,00	DP3AP2KB
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-		-	661.000.000,00			-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				11 laporan	661.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DP3AP2KB
	X					NON URUSAN					80.000.000,00							156.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					80.000.000,00							156.000.000,00	
11	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	80.000.000,00					-		156.000.000,00	

[illegible]

	X	XX	01	2.06	0006	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	DP3AP2KB
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		70.000.000,00	DP3AP2KB
	X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		15.000.000,00	DP3AP2KB
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	25.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	27.000.000,00	
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		27.000.000,00	DP3AP2KB
		J U M L A H										7.930.377.000,00							8.299.100.000,00	